

Judul : GFC capai Rp 992 triliun, DPR: jejaring tambang makin berkembang
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

GFC Capai Rp 992 Triliun

DPR: Jejaring Tambang Makin Berkembang

ANGGOTA Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menilai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait tindak pidana kejahatan keuangan berbasis lingkungan, khususnya di sektor pertambangan emas. Kejahatan lingkungan dinilai telah berkembang menjadi sebuah kejahatan keuangan berskala besar.

"Perputaran uang di pertambangan emas ilegal mencapai Rp 992 triliun. Ini uang besar dan ada kekuatan besar di belakangnya ini," ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Diketahui, PPATK menemukan tindak pidana kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) pada 2025 mencapai Rp 992 triliun. Kejahatan lingkungan yang dimaksud termasuk dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia seperti, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Sedangkan selama periode 2023 hingga 2025, total nilai transaksi terkait PETI mencapai Rp 185,03 triliun.

Sudding melanjutkan, akhir-akhir ini beberapa perusahaan tambang dicabut izinnya oleh Pemerintah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan di sektor pertambangan dan perkebunan. Termasuk masalah distribusi emas ilegal lintas wilayah hingga ke pasar luar negeri. "Ini menandakan adanya jejaring internasional yang memang sulit disentuh," kata politikus PAN ini.

Menurut Sudding, kejahatan semacam ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pencucian uang dan penghindaran terhadap pajak. Sehingga lembaga penegak hukum harus membuka ke masyarakat siapa saja pemain di belakang perusahaan tambang ilegal itu.

"Sejauh mana keterlibatan korporasi dan aktor lintas negara dalam rantai keuangan terkait masalah pertambangan emas tanpa izin," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

Namun, dia memandang temuan ini belum berdampak signifikan pada pemulihan lingkungan di Indonesia. Sehingga PPATK perlu berkoordinasi



Sarifuddin Sudding

dengan aparat penegak hukum guna mengusut tuntas seluruh tambang ilegal yang ada di seluruh Indonesia.

Senada, anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan menyoroti perputaran dana di pertambangan ilegal yang kian meningkat tajam. Awalnya berada di kisaran Rp 339 triliun kini melonjak tajam hingga menembus Rp 992 triliun.

Lonjakan perputaran dana tersebut menunjukkan aktivitas tambang ilegal di beberapa daerah di Indonesia membesar dan

terorganisasi. "Jadi bukan hilang tapi malah makin tambah. Ini menunjukkan jejaringnya hidup dan berkembang," kata Hince di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hince menyebut, setidaknya terdapat uang sebesar Rp 185 triliun yang teridentifikasi langsung dalam satu jejaring transaksi, dengan aliran dana yang masuk ke rekening pemain besar. Bahkan sebagian dana tersebut mengalir lintas pulau dan terhubung ke pusat pengolahan serta perdagangan emas di Jawa dan kota-kota besar. "Sebelum akhirnya bergerak ke luar negeri melalui mekanisme ekspor," ungkap politikus Demokrat ini.

Selain itu, Hince menyoroti paradoks sektor emas nasional. Di mana Indonesia masuk jajaran 10 besar produsen emas dunia dengan cadangan sekitar 3.600 metrik ton. Tapi produksi emas domestik justru fluktuatif dan cenderung menurun. "Pada 2023, produksi nasional hanya sekitar 83 ton, turun dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya.

Terlebih PT Antam yang se-

lama ini dianggap sebagai pemain utama, ternyata hanya mampu memproduksi sekitar 1 ton emas dari tambang sendiri per tahun, sementara penjualan logam mulia mencapai 43-44 ton. "Artinya, lebih dari 90 persen emas yang dijual berasal dari pembelian pihak lain. Di sinilah intelijen keuangan menjadi sangat penting untuk melihat asal-usul emas itu," kata Hince menekankan.

Hince bilang, hal itu menunjukkan aktivitas tambang emas ilegal telah membentuk ekosistem bayangan yang nyaris lengkap. Mulai dari wilayah konsesi, logistik, penadah, *smelter*, jalur ekspor, hingga rekening perbankan.

Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan temuan transaksi di tambang ilegal termasuk emas mencapai Rp 992 triliun. Hingga kini, temuan tersebut dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian. "Kerja sama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas," ucap Ivan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ■ TIF